

**PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM UPAYA
PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN KARYA JAYA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

KARTIKA SARI

NIM. 07011282025080

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM UPAYA
PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KELURAHAN KARYA JAYA
KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik

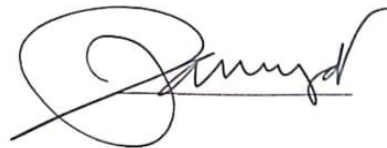
Oleh:

KARTIKA SARI
NIM. 0701282025080

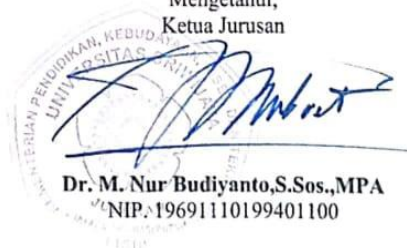
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2024

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S. IP., SH., M. Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199401100

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM UPAYA
PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN KARYA JAYA
KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh :
KARTIKA SARI
07011282025080

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 22 Mei 2024

Pembimbing :

Tanda Tangan

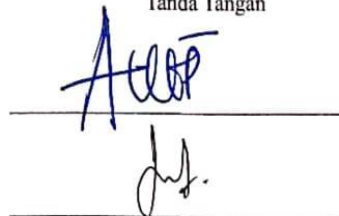
1. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Penguji :

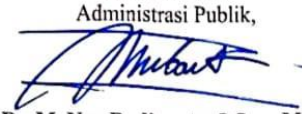
Tanda Tangan

1. Aulia Utami Putri, S.IP., M. Si
NIP. 199508142019032020
2. Lisa Mandasari, S. IP., M. Si
NIP.198603272023212029



Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Sari

NIM : 07011282025080

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Perencanaan Partisipatif dalam Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang ditetapkan kepada saya.

Demikian pernyataan yang dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Vona Membuat Pernyataan,
Palembang, Mei 2024



Kartika Sari

NIM.07011282025080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak perlu khawatir dengan jalan yang Tuhan beri, nikmati setiap proses hidupmu, jalani dengan keikhlasan, raih hasil terbaik dengan usaha, doa dan kerja kerasmu”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya
3. Seluruh dosen dan pegawai
FISIP UNSRI
4. Para teman seperjuangan
Administrasi Publik 2020
5. Sahabat saya

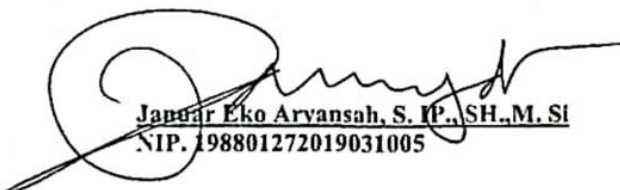
ABSTRAK

Perencanaan partisipatif dapat diartikan sebagai perencanaan yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan dalam mencapai tujuannya harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Perencanaan partisipatif dijadikan sebagai salah satu langkah upaya dalam pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengentasan permukiman kumuh menjadi suatu keharusan, akan tetapi respon setiap masyarakat di lapangan tentunya tidak akan selalu sama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam upaya pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Alexander Abe (2002) yang mengemukakan bahwa ada enam dimensi sebagai tahapan perencanaan partisipatif yaitu Tahap penyelidikan, Tahap perumusan masalah, Tahap Identifikasi daya dukung, Tahap perumusan tujuan, Menetapkan langkah-langkah secara rinci dan Merancang anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif di Kelurahan Karya Jaya sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal. Adapun kendala yang masih terjadi adalah kesadaran masyarakat yang belum cukup baik untuk selalu ikut serta dalam kegiatan pengentasan permukiman kumuh, selain itu ketidaksampaian informasi kepada masyarakat juga menjadi kendala dalam tercapainya tujuan perencanaan partisipatif dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh.

Kata Kunci : Perencanaan Partisipatif, Permukiman Kumuh, Masyarakat

Pembimbing



Januar Eko Arvansah, S. IP., SH., M. SI
NIP. 198801272019031005

Indralaya, Mei 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budlyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

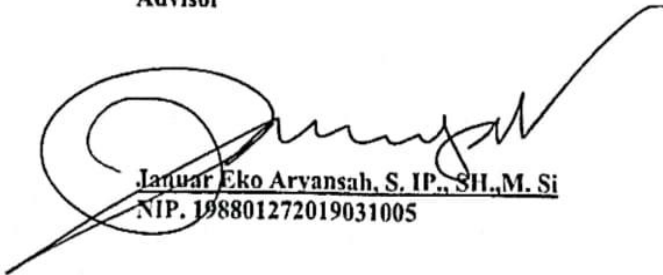
ABSTRACT

Participatory planning can be defined as planning which in its implementation involves the community and in achieving its goals must be based on the interests of the community. Participatory planning is used as one of the steps in alleviating slum settlements in Karya Jaya Village, Palembang City. Community participation in efforts to eradicate slum settlements is a necessity, but the response of each community in the field will of course not always be the same. Therefore, this research aims to examine more deeply the implementation of participatory planning in efforts to eradicate slum settlements in Karya Jaya Village, Palembang City.

This study uses a qualitative method. Data obtained through interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of Alexander Abe (2002) which suggests that there are six dimensions as participatory planning stages, namely the investigation stage, problem formulation stage, supporting capacity identification stage, goal formulation stage, determining detailed steps and designing a budget. The results of the research show that participatory planning in Karya Jaya Subdistrict has been implemented but is not optimal. The obstacle that still occurs is that public awareness is not good enough to always participate in slum eradication activities. Apart from that, the lack of information conveyed to the public is also an obstacle in achieving the goals of participatory planning in overcoming slum settlement problems.

Keywords: *Participatory Planning, Slum Settlements, Community*

Advisor



Januar Eko Arvansah, S. IP., SH., M. Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, May 2024
Chairman of the Public Administrator Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Partisipatif dalam Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah memberikan berkah kesehatan dan ilmu yang bermanfaat.
2. Kedua orang tua saya yang mendukung selama proses penyusunan skripsi
3. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufiq Marwa,S.E.,M.Si
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Alfitri, M.Si
5. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,M.PA
6. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Januar Eko Aryansah,S.IP.,SH.,M.Si
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk keperluan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan
8. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat- surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat merima kritikan dan saran membangun dan berkaitan dengan skripsi ni. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Palembang, 2023

Kartika Sari
NIM.0701282025080

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
.....	vi
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perencanaan.....	11
2.2 Partisipasi.....	13
2.3 Pengertian Perencanaan Partisipatif.....	15

2.3.1	Alasan Dilakukan Perencanaan Partisipatif	16
2.3.2	Kriteria Perencanaan Partisipatif	16
2.3.3	Dampak Positif Dalam Perencanaan Partisipatif	17
2.3.4	Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif	17
2.3.5	Prinsip perencanaan partisipatif	18
2.3.6	Teori perencanaan partisipatif.....	19
2.4	Permukiman Kumuh	22
2.4.1	Penyebab munculnya permukiman kumuh.....	24
2.4.2	Ciri-Ciri Permukiman Kumuh	25
2.4.3	Kriteria Permukiman Kumuh.....	26
2.5	Penelitian terdahulu	27
2.6	Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Definisi Konsep.....	44
3.3	Fokus Penelitian	45
3.4	Jenis dan Sumber Data	46
3.5	Informan Penelitian	47
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7	Teknik Analisis Data.....	49
3.8	Teknik Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1	Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang	53
4.1.2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang	53
4.1.2.1	Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.	54
4.1.2.2	Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	54
4.1.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	54
4.1.2.4	Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	55

4.1.3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Kota Palembang.....	57
4.1.3.1	Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Kota Palembang	57
4.1.3.2	Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Kota Palembang	58
4.1.3.3	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Kota Palembang	58
4.1.4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang.....	62
4.1.4.1	Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.....	62
4.1.4.2	Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.....	62
4.1.4.3	Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kota Palembang	62
4.1.4.4	Susunan dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Palembang	63
4.2	Penyajian Data.....	68
4.2.1	Perencanaan Partisipatif dalam Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang	68
4.2.1.1	Tahap Penyelidikan.....	69
4.2.1.2	Tahap Perumusan Masalah	74
4.2.1.3	Tahap Identifikasi Daya Dukung	78
4.2.1.4	Tahap Perumusan Tujuan.....	82
4.2.1.5	Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci	87
4.2.1.6	Merancang Anggaran.....	94
4.3	Pembahasan	96
4.3.1	Perencanaan Partisipatif dalam Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh	96
4.3.1.1	Tahap Penyelidikan.....	96
4.3.1.2	Tahap Perumusan Masalah	97
4.3.1.3	Tahap Identifikasi Daya Dukung	98
4.3.1.4	Tahap Perumusan Tujuan.....	99
4.3.1.5	Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci	100
4.3.1.6	Merancang Anggaran.....	102
4.4	Diskusi	103
BAB V PENUTUP.....		109
5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kepadatan Penduduk. (Jiwa/km ²), 2020-2022 di Provinsi Sumatera Selatan.....	2
Tabel 2 Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman kumuh Di Kota Palembang	4
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	46
Tabel 5 Informan Penelitian.....	48
Tabel 6 Matriks Hasil Temuan Penelitian.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi Pinggiran Jalan di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang	6
Gambar 2 Kondisi Saluran Air di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang	7
Gambar 3 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4 Tahapan Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	50
Gambar 5 Sampah Area Jalan	74
Gambar 6 Jalan Rusak	76
Gambar 7 Jalan Non Aspal	76
Gambar 8 Rapat bersama masyarakat	83
Gambar 9 Patisipasi Masyarakat	85
Gambar 10 Kegiatan Gotong Royong	92
Gambar 11 Motor pengangkut sampah	91
Gambar 12 Pembersihan	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Skripsi	116
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	118
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	121
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi	123
Lampiran 5 Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	124
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi	125
Lampiran 7 Pedoman Wawancara	126
Lampiran 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011	135
Lampiran 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018	136
Lampiran 10 Keputusan Walikota Palembang Tahun 2020	137
Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian	138

DAFTAR SINGKATAN

Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IPW	: Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Litbang	: Divisi Penelitian dan Pengembangan
LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perkimtan	: Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang banyak tentunya mempunyai *problem* yang begitu kompleks pada perkotaan. Jika dilihat dari segi kependudukannya yang cukup besar maka dibutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang bijak dari pemerintah agar permasalahan perkotaan di Indonesia dapat teratasi dengan baik. Perihal permasalahan perkotaan, tentunya disetiap kota memiliki jenis permasalahan yang beragam, salah satunya permasalahan permukiman kumuh di Kota Palembang yang diakibatkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk secara terus-menerus sehingga menimbulkan kepadatan penduduk di suatu permukiman. Pertumbuhan penduduk dikarenakan tingginya angka kelahiran dan urbanisasi masyarakat dari desa ke kota (Alfian & Akbar (dalam Apriliani *et al.*, 2022)). Perpindahan ini disebabkan masyarakat membutuhkan pekerjaan dengan gaji cukup memadai meskipun tanpa mempertimbangkan kelayakan lingkungan tempat tinggal bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan gaji antara desa dan kota sehingga menyebabkan kesenjangan yang membuat masyarakat desa pergi ke kota untuk gaji yang lebih besar (Todaro dan Revenstein (dalam Hidayati, 2021)).

Jika pertumbuhan penduduk semakin bertambah setiap tahunnya maka permintaan kebutuhan sarana dan prasarana publik juga semakin meningkat untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari, sejalan dengan perubahan jumlah penduduk yang semakin banyak maka besar juga didalam usaha masyarakat untuk

memenuhi segala kebutuhannya serta tingginya tingkat pengangguran yang ada.

Semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan banyaknya persaingan serta lapangan pekerjaan yang memadai Subandi (dalam Syam & Wahab, 2015). Selain itu, masyarakat tanpa kepemilikan lahan tempat tinggal yang luas, lebih memilih tinggal didaerah permukiman yang padat antara rumah satu dengan yang lain, dengan akses jalan yang sempit, ketidakteraturan bangunan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, tidak terpeliharanya drainase, serta sampah dan limbah yang dibuang sembarangan disekitaran rumah. Keadaan seperti inilah yang memicu rendahnya kualitas hidup sehat dan kenyamanan bagi masyarakat karena tinggal di daerah permukiman kumuh dan padat penduduk. Lingkungan tempat tinggal membentuk pola hidup yang dijalankan masyarakat, rendahnya kualitas lingkungan sekitar serta kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang hidup masyarakat, maka masyarakat tentunya merasa tidak nyaman menjalani aktivitas maupun kegiatannya.

Tabel 1 Data Kepadatan Penduduk. (Jiwa/km²), 2020-2022 di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk. (Jiwa/km ²)		
	2020	2021	2022
Sumatera Selatan	92,45	93,36	100,00
Ogan Komering Ulu	76,63	77,36	100,00
Ogan Komering Ilir	41,91	42,09	46,00
Muara Enim	83,00	83,67	92,00
Lahat	80,97	81,88	102,00
Musi Rawas	62,29	62,79	66,00
Musi Banyuasin	43,61	43,95	44,00
Banyuasin	70,73	71,32	70,00
Ogan Komering Ulu Selatan	74,44	75,83	125,00

Ogan Komering Ulu Timur	192,83	193,79	150,00
Ogan Ilir	156,24	157,31	184,00
Empat Lawang	147,85	152,38	160,00
Pali	105,92	107,22	109,00
Musi Rawas Utara	31,34	31,69	32,00
Palembang	4519,93	4566,58	4845,00
Prabumulih	766,83	776,96	445,00
Pagar Alam	227,01	229,25	235,00
Lubuk Linggau	583,23	589,86	653,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan tentang kepadatan penduduk di Sumatera Selatan menurut kabupaten/kota pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan tabel kepadatan penduduk dapat dilihat bahwa jumlah penduduk provinsi Sumatera Selatan sebagian besar mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022, salah satunya kenaikan kepadatan penduduk di Kota Palembang dimana pertumbuhan penduduk yang melaju pesat dan relatif meningkat yaitu hingga mencapai angka 4845,00 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan Kota Palembang berpotensi menyebabkan permukiman kumuh yang terjadi di beberapa wilayah.

Kota Palembang sebagai kota metropolitan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Sumatera Selatan. Pemerintah memerlukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penataan dan pengelolaan kawasan Kota Palembang. Akan tetapi pada faktanya, beberapa daerah di Kota Palembang masih terkategori sebagai permukiman kumuh, tentu hal ini masih menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mewujudkan daerah perkotaan bebas kumuh. Munculnya permasalahan kawasan kumuh di Kota Palembang menjadi fenomena yang kompleks namun bukan masalah baru yang timbul. Masyarakat yang

tinggal di permukiman baru yang baru pada kawasan yang bukan daerah permukiman menyebabkan banyaknya kawasan permukiman liar. Pemerintah tentunya harus mengambil tindakan cepat dalam menangani masalah kawasan permukiman kumuh ini karena akan berdampak pada peran pemerintah yang tidak optimal terutama pada pengelolaan tata ruang dan kota.

Tabel 2 Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman kumuh Di Kota Palembang

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
1.	23 Ilir	2.950	21	Kumuh Ringan
2.	24 Ilir	11.500	17	Kumuh Ringan
3.	26 Ilir	3.740	19	Kumuh Ringan
4.	36 Ilir	13.494	17	Kumuh Ringan
5.	Gandus	7.795	16	Kumuh Ringan
6.	Karang Anyar	21.290	20	Kumuh Ringan
7.	Karang Jaya	4.382	20	Kumuh Ringan
8.	Pulo Kerto	64.847	21	Kumuh Ringan
9.	27 Ilir	1.450	18	Kumuh Ringan
10.	28 Ilir	5.731	22	Kumuh Ringan
11.	29 Ilir	13.900	18	Kumuh Ringan
12.	30 Ilir	10.236	16	Kumuh Ringan
13.	32 Ilir	11.953	17	Kumuh Ringan
14.	35 Ilir	11.020	18	Kumuh Ringan
15.	13 Ilir	0.500	23	Kumuh Ringan
16.	14 Ilir	1.870	22	Kumuh Ringan
17.	15 Ilir	4.000	21	Kumuh Ringan
18.	1 Ilir	1.258	21	Kumuh Ringan
19.	2 Ilir	14.378	16	Kumuh Ringan
20.	Lawang Kidul	19.928	16	Kumuh Ringan
21.	10 Ilir	1.884	17	Kumuh Ringan
22.	11 Ilir	0.284	16	Kumuh Ringan

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
23.	Kuto Batu	4.694	17	Kumuh Ringan
24.	15 Ulu	30.050	19	Kumuh Ringan
25.	8 Ulu	22.630	25	Kumuh Ringan
26.	9/10 Ulu	32.997	16	Kumuh Ringan
27.	Silaberanti	2.770	18	Kumuh Ringan
28.	Tuan Kentang	6.200	19	Kumuh Ringan
29.	Sei Selayur	4.475	16	Kumuh Ringan
30.	Karya Jaya	150.890	28	Kumuh Ringan
31.	Kemang Agung	89.800	23	Kumuh Ringan
32.	Kemas Rindo	24.760	19	Kumuh Ringan
33.	Keramasan	77.250	18	Kumuh Ringan
34.	Kertapati	32.089	21	Kumuh Ringan
35.	Ogan Baru	43.150	18	Kumuh Ringan
36.	Bagus Kuning	13.074	17	Kumuh Ringan
37.	Plaju Darat	56.074	18	Kumuh Ringan
38.	Plaju Ilir	10.210	19	Kumuh Ringan
39.	Plaju Ulu	7.000	20	Kumuh Ringan
40.	Talang Bubuk	1.830	21	Kumuh Ringan
41.	Talang Putri	4.710	18	Kumuh Ringan
42.	1 Ulu	3.910	19	Kumuh Ringan
43.	2 Ulu	17.090	20	Kumuh Ringan
44.	3-4 Ulu	16.240	17	Kumuh Ringan
45.	5 Ulu	21.830	20	Kumuh Ringan
46.	7 Ulu	30.610	20	Kumuh Ringan
47.	11 Ulu	10.314	16	Kumuh Ringan
48.	12 Ulu	7.380	19	Kumuh Ringan
49.	13 Ulu	40.370	16	Kumuh Ringan
50.	14 Ulu	48.700	18	Kumuh Ringan
51.	16 Ulu	21.893	17	Kumuh Ringan
52.	Sentosa	7.200	16	Kumuh Ringan

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
53.	Tangga Takat	23.132	19	Kumuh Ringan

Sumber: Keputusan Wali Kota Palembang tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Palembang.

Berdasarkan tabel lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Palembang, terdapat 53 lokasi kelurahan di Kota Palembang yang tergolong sebagai kumuh ringan. Adapun penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang, karena lokasi tersebut belum memiliki infrastuktur pembangunan serta sarana dan prasarana secara menyeluruh sehingga termasuk dalam kategori kekumuhan yang belum terselesaikan, selain itu Kelurahan Karya Jaya juga menjadi kelurahan dengan nilai tertinggi pada tingkat kekumuhan yaitu mencapai angka 28. Kemudian partisipasi masyarakat juga masih rendah dalam keikutsertaan upaya pengentasan permukiman kumuh. Selain itu, pengelolaan sampah di Kelurahan Karya Jaya belum terbilang baik, banyak masyarakat tidak sadar merusak lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut sesuai pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 Kondisi Pinggiran Jalan di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Berdasarkan gambar 1 kondisi Pinggiran Jalan di Kelurahan Karya Jaya, Kota Palembang, bahwasannya masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik dilingkungannya. Sampah yang dibuang sembarangan secara terus-menerus di sekitaran pinggir jalan dan lahan kosong membuat lingkungan tersebut menjadi tidak terawat. Selain membuang sampah pada sekitaran jalan, masyarakat juga membuang sampah ke saluran air, hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadi penyumbatan saluran akibat sampah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 2 Kondisi Saluran Air di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Berdasarkan gambar 2 kondisi saluran air di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang, bahwasannya berbagai sampah yang dibuang sembarangan ke saluran air membuat saluran air tersebut tidak berfungsi secara baik, tumpukan sampah tersebut juga menyebabkan sekitaran saluran air mengeluarkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan kondisi tersebut, belum optimalnya pengelolaan sampah menunjukkan bahwa belum sepenuhnya kesadaran diri masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Meskipun 53 kelurahan tersebut tergolong sebagai kawasan kumuh ringan, permasalahan permukiman kumuh menjadi masalah penting dan diperlukan upaya penyelesaiannya. Jika permasalahan ini terus dibiarkan, maka permukiman kumuh di Kota Palembang tidak akan mengalami penurunan, maka dari itu diperlukan

keselarasan antara menjalankan berbagai upaya dari pemerintah dalam bentuk perencanaan kegiatan dengan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, menjaga agar lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat tidak semakin menyebar menjadi permukiman kumuh berat.

Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam melakukan pengentasan kawasan permukiman kumuh dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang. Perencanaan partisipatif identik dengan perencanaan yang mengikutsertakan masyarakat, artinya masyarakat turut serta dalam kegiatan perencanaan. Perlunya partisipasi masyarakat dalam ikutserta menentukan dan merumuskan masalah, serta alternatif dari pemecahan masalah Hanif Nurcholis (dalam Nurisneni *et al.*, 2021). Peran masyarakat dalam ikut serta rencana kegiatan dan program menjadi sangat penting khususnya pada kegiatan pengentasan permukiman kumuh. Seringkali terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat maupun pemerintah dalam membentuk kerjasama yang baik. Pemerintah nampaknya belum mempercayai sepenuhnya potensi yang dimiliki masyarakat, hal ini akan berdampak tidak akan terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh, masyarakat belum memiliki pola pikir yang lebih terbuka akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pengentasan permukiman kumuh. Pemerintah perlu melakukan pencegahan dengan keikutsertaan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 95, perlunya pencegahan dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat agar tidak menimbulkan kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Pasal 131 juga

menjelaskan dalam penyelenggaraannya diperlukan peran masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 63 yang menjelaskan dibutuhkan partisipasi masyarakat yang berperan penting dalam perencanaan penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Para *stakeholders* harusnya turut serta dalam pemberantasan kawasan permukiman kumuh, jika hal ini tidak diatasi segera akan memicu banyaknya kawasan kumuh lain yang akan memenuhi Kota Palembang. Pemerintah yang tidak memiliki anggaran yang sesuai dalam menyediakan daerah hunian yang layak serta cadangan lahan di perkotaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan potensi yang dimiliki (Sedubun *et al.*, 2023). Diperlukan penanganan khusus dalam menuntaskan masalah ini, karena merupakan suatu upaya dalam mencapai pemerataan pembangunan. Penanganan permukiman kumuh dapat berjalan semestinya jika telah memaksimalkan partisipasi semua pihak dalam pemberantasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Peran utama pemerintah melalui pembagian tugas dari *stakeholders* terkait, diantaranya Bappeda Litbang, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, sebagai Dinas yang menaungi dalam hal penataan kawasan kumuh serta dengan peran masyarakat dalam berpartisipasi dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam upaya pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam upaya pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademik, dapat memberikan dampak yang nyata untuk kemajuan pendidikan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini tentunya memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis serta pengetahuan khusus yang tidak diketahui sehingga dapat mengembangkan potensi penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi objek penelitian, menjadi masukan agar kedepannya dengan adanya perencanaan partisipatif tidak terdapat lagi permukiman kumuh di Kelurahan Karya Jaya Kota Palembang
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta memberi masukan kepada masyarakat dan organisasi setempat untuk berani mengambil peran dimasyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. P. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. Otoritas : *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.55>
- Afrina, S., & Fuady, Z. (2021). Identifikasi Faktor Penyebab Utama Kekumuhan Permukiman di Dusun Tengku Muda, Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, Vol 5, No.2, , hal 58–64.
- Aguspriyanti, C. D., Nimita, F., & Deviana, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.37253/jad.v1i2.1501>
- Akbar, I. (2018). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 5(1),105-107
- Anwar, Y., Setyasih, I., & Herlan, H. (2021). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 584–591. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.702>
- Apriliani,dkk, Apriliani, D., Heldayani, E., Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang, Utomo, B., Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang, Setianto, H., & Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Tuan Kentang Kota Palembang. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 20(2), 73–84. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7>
- Ariani, A. (2022). Analisis Perencanaan Ketenagakerjaan Di Kota Tarakan. *Jurnal Ekonomika*, 13(01). <https://doi.org/10.35334/jek.v13i0.2421>
- Arifin, B. (2015). *Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Brata, J. T., Djauhar, A., Sufrianto, Jawiah, St., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i1.57>
- Buana, D. S., Sari, R. P., & Rahmayuda, S. (2022). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pontianak Berbasis Website. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 3(4), 384. <https://doi.org/10.30865/json.v3i4.4206>
- Budiyanto, H. (2011). Pendampingan Dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk). *Jurnal Ilmiah Online*,3(1),34-40
- Darwis, R. S. (n.d.).(2018) Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat Desa Dalam

- Perencanaan. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 7(4), 290-297
- Dewi, K. P., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2019). Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria Eco- Settlement Di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6.
- Fitri, D. A. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur)*. 1 (1).
- Fitri Efendi. (2020). Analisis Kompetensi, Sarana Prasarana Dan Perencanaan Program Pelatihan Terhadap Kualitas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. *KINDAI*, 16(2), 177–200. <https://doi.org/10.35972/kindai.v16i2.389>
- Frans Mitrano. (2020). Tanggungjawab Pihak Pengembang Perumahan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan Konsumen di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 29–50. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.6018>
- Gholib, A. (2020). Penataan Permukiman Di Kawasan Kampung Seng Kota Blitar. *Revitalisasi*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.869>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.
- Hariyanto, S. (2013). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2013. 1(1).
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Himang, A. M. (2015). *Perencanaan Partisipatif Dalam Musrenbang Kampung*. 3 (3), 371–388.
- Husniyah, H. (2021). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. 1(3).
- Ibrahim, M., & Syarifuddin, S. (2017). Gerakan Makassar Tidak Rantasa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.288>
- In'am, A., Khoiri, Y., & Ma'sum, T. (2023). *Manajemen Perpustakaan Dalam Menumbuhkan Minat Baca*. 9(1).
- Haryani, E., Rukmi, W., & Setyono, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Plpbk (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) Di Rw 04, Kelurahan Polehan, Kota Malang. *Tata Kota dan Daerah*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2019.011.01.1>
- Kumalasari, D., & Tisnawati, T. (2018). Penataan Sistem Drainase Permukiman Berbasis Masyarakat Dengan Metode Perencanaan Partisipatif Di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 32(1), 19. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v32i1.933>
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.244>

- Maulana, D. F., & Hermansah, T. (2021). Pemberdayaan Berbasis Pariwisata Melalui Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Jurnal Kommunity Online*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.15408/jko.v2i1.21889>
- Mone and Mustari—2021—Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2(2)591-603
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Normina, N. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(26), 72-85. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Nurhidayati, D., & Iqbal, A. (2022). Strategi Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati (taman KEHATI) Lahan Eks TPA Menjadi Pariwisata Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(4), 850–855.
- Nurisneni dkk, & Nurisneni, A. (2021). *Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar*. 2.
- Padang, W. S., & Kusmanto, H. (2015). *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019*. 6(2).
- Peranginangin, L. S. U. (n.d.).(2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 18(1), 66-77
- Pin, P., & Lubis, M. A. R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 395–414. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.296>
- Pratama, I. A. (2021). *Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan Di Dusun Karang Swela Kabupaten Lombok Utara*. 8(4).
- Purnianingtyas, D., & Juliprijanto, W. (2021). Pengaruh Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Daerah (Spald) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(2), 168-178
- Rachmawati, N., Siraj, N., & Bharoto, R. H. (2018). *Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*. 6.
- Rahayu, E., & Suroso, A. (2020). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 134–152. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.252>
- Sedubun, S. N., Purwanti, N., & Kadir, M. A. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam

- Mengatasi Kawasan Kumuh Perkotaan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong. *Journal of Sociology*.1(1), 23–31.
- Sigalingging, A. H., Dairi, P. K., & No, J. S. R. (2014a). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik* 2(2).117-142
- Sigalingging, A. H., Dairi, P. K., & No, J. S. R. (2014b). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2),117-133
- Syafaati, D., & Widodo, S. T. (2023). *Implementasi Kurikulum Cambridge di SD Nasima Kota Semarang*. 9(1), 90–98.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry*. 1(3), 51–61.
- Syam, S., & Wahab, A. (2015). *Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar*. 1(1), 35–54.
- Sugiyono.(2013).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.Afabeta,Bandung
- Uceng, A., Ali, A., & Mustanir, A. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal MODERAT* ,5(2),1-17